

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengamanatkan bahwa segala urusan Pemerintah Daerah diserahkan kepada pihak Pemerintah Daerah, saat ini daerah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Kewenangan yang lebih luas, nyatadan bertanggung jawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Otonomi Daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan di daerahnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, pembangunan di daerah di nilai mampu apabila daerah sendiri yang menanganinya.

Ada beberapa macam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kendal diantaranya yaitu pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak pengambilan bahan

galian golongan C, serta pajak air bawah tanah. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan(PBB-P2) yang dianggap memiliki potensi-potensi yang masih belum maksimal pengelolaannya.

Keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat ditentukan oleh kemampuan negara dalam pembangunan nasional, agar pembangunan dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan dana dalam pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang obyeknya bumi dan bangunan dan wajib pajaknya orang atau badan yang memiliki, menguasai dan atau mengambil manfaat atas bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut jumlah obyek dan wajib pajak PBB sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan , perhutanan , dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang

dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata :

- (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi;
- (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan , sebagaimana yang terjadi di lapangan, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang ada didalamnya terutama masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya(Kurniawan, 2015 :1).

Berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam hal ini menteri keuangan dan dirjen pajak menciptakan suatu sistem yang terpadu untuk memberi pelayanan yang baik dan meningkatkan penerimaan yang disebut SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak).Sistem ini merupakan perpaduan antara pendataan PBB, penetapan PBB, penagihan dan penerimaan PBB yang dikelola secara komputerisasi, dengan SISMIOP dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan up to date dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB ke dalam satu wadah, sehingga pelaksanaannya dapat lebih seragam, sederhana, cepat, dan efisien.

Penerapan SISMIOP di kota Kendal diharapkan penerimaan PBB akan meningkat dan tingkat pelayanan menjadi lebih baik.Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian :

**“PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBYEK
PAJAK (SISMIOP) SEBAGAI SARANA PENINGKATAN PELAYANAN
DAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN
KENDAL TAHUN 2016”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan-permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan SISMIOP terhadap peningkatan dan penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Kendal Tahun 2016?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan SISMIOP sebagai sarana peningkatan pelayanan dan penerimaan Pajak Bumi Bnagunan (PBB) di Kabupaten Kendal Tahun 2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang merupakan proses dalam mencari data dan informasi yang selanjutnya dikumpulkan, diolah dan dianalisis untuk mencari keakuratan data dan/atau informasi dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, sebagai tujuan untuk memecahkan kebenaran permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui penerapan SISMIOP terhadap peningkatan dan penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Kendal Tahun 2016

2. Untuk Mengetahui hambatan dalam penerapan SISMIOP sebagai sarana peningkatan pelayanan dan penerimaan Pajak Bumi Bnagunan (PBB) di Kabupaten Kendal Tahun 2016

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mempunyai beberapa manfaat. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Kendal, sebagai bahan informasi dan acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SISMIOP terhadap peningkatan dan penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Kendal Tahun 2016.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat juga mengetahui bagaimana penerapan SISMIOP terhadap peningkatan dan penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Kendal Tahun 2016.

3. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah pengetahuan dalam mekanisme pemungutan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Kendal, serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Ahli Madya dan menyelesaikan Program Kuliah Diploma III Keuangan Daerah FISIP UNDIP.

1.4 Dasar Teori

Teori adalah seperangkat construct (konsep terbuat), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan hubungan – hubungan antar variable, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Dari definisi diketahui bahwa teori mengandung hal yaitu :

1. Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep – konsep yang saling berhubungan.
2. Teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan- hubungan antar konsep.
3. Teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

1.4.1. Pajak

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutangoleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terusmenerus dan berkesinambungan .Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang salah satu sumber dananya berasal dari dalam negeri yaitu sektor pajak.

Menurut Mardiasmo (2006:1) , pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

1.4.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan atau manfaat dari pajak itu sendiri . Umumnya terdapat 2 fungsi pajak yang dikenal , yaitu :

a. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah .Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi . Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah dapat ditekan

1.4.3. Jenis Pajak

Sesuai dengan asas pemungutan pajak , maka di Indonesia ditetapkan berbagai pengelompokan pajak agar dapat membedakan antara pajak yang satu dengan pajak yang lain. Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam , yaitu (Mardiasmo) :

a. Menurut Golongannya :

1. Pajak Langsung Adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain .
2. Pajak Tidak Langsung Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain .

b. Menurut Sifatnya :

1. Pajak Subjektif Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya , dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
2. Pajak Objektif Adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak .

c. Menurut Lembaga Pemungutnya :

1. Pajak Pusat

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara .

2. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

1.4.4. Pajak Bumi Bangunan

1.4.4.1. Pengertian Pajak Bumi Bangunan

Menurut Soemitro (2006:1) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak objektif.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat yang merupakan sumber penerimaan Negara yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat daerah tempat objek pajak.

Dari peranan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Namun sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, Pajak Bumi dan Bangunan kini merupakan Pajak Daerah yang 100 % penerimaannya akan diterima oleh Daerah yang bersangkutan. Dimana selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada

daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

1.4.4.2. Subjek Pajak Bumi Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau ;
- b. Memperoleh manfaat atas bumi , dan / atau ;
- c. Memiliki , menguasai atas bangunan , dan / atau ;
- d. Memperoleh manfaat atas bangunan

1.4.4.3. Objek Pajak Bumi Bangunan

Ditinjau dari jenis pajaknya , Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan . Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pendalaman (termasuk rawa-rawa dan tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia . Menurut Mardiasmo (2002:271) dalam menentukan klasifikasi bumi dan bangunan, Menteri Keuangan harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Bumi/tanah:

- 1) Letak;
- 2) Peruntukan;
- 3) Pemanfaatan;
- 4) Kondisi;

b. Bangunan:

- 1) Bahan yang digunakan;
- 2) Rekayasa;
- 3) Letak;
- 4) Kondisi lingkungan dan lain-lain

Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1), yang menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan , perhutanan , dan pertambangan.

Selanjutnya penjelasan dari Pasal 77 ayat (2), menguraikan lebih lanjut mengenai pengertian bangunan yang menjadi objek PBB adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek suatu bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan

lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

- b. Jalan TOL;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan;
- i. Menara.

Dalam rangka memberikan manfaat kepada pemerintahan atau berupaya dalam pelaksanaan pemungutan PBB secara adil maka undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tentang klasifikasi objek pajak. yang dimaksud dengan klasifikasi objek bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak terhutang.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pasal 77 ayat (3) UU No 28 Tahun 2009 yaitu objek pajak yang :

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan

- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak;
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan;

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib pajak.

1.4.5. Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk, hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundangundangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

1. Enggan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
2. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum

3. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam

pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

1.4.6. Pengertian SISMIOP

SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah institusi data obyek dan subyek PBB dengan bantuan computer dimulai dari pengumpulan data, pemberian nomor identitas obyek pajak (NOP) perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pemantauan penerimaan, pelaksanaan penagihan dan pelayanan.

Sebelum dilaksanakan SISMIOP, pada waktu itu pengelolaan PBB dilaksanakan oleh seksi-seksi masing-masing dan berdiri sendiri, yaitu:

- a. Seksi penetapan
- b. Seksi pendataan
- c. Seksi penilaian
- d. Seksi penerimaan
- e. Seksi penagihan

Masing masing seksi mempunyai program sendiri-sendiri.

1.4.7. Unsur – unsur SISMIOP

Unsur-Unsur Pokok SISMIOP terdiri dari lima unsur:

- a. NOP (Nomor Objek Pajak) merupakan nomor unik yang menunjukkan identitas tiap-tiap objek pajak.
- b. Blok, ditetapkan menjadi suatu areal pengelompokkan bidang tanah terkecil untuk digunakan sebagai petunjuk lokasi objek pajak yang

unik dan permanen. Syarat utama sistem identifikasi objek pajak adalah stabilitas. Perubahan yang terjadi pada sistem identifikasi dapat menyulitkan pelaksanaan dan administrasi.

- c. Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan pengelompokan kepemilikan tanah dalam suatu blok peta yang memiliki nilai/harga yang sama. Format penomoran ZNT mulai dari AA sampai dengan ZZ. ZNT nomor AA mengindikasikan kelompok kepemilikan tanah dengan nilai tertinggi pada blok peta tersebut. ZNT nomor ZZ mengindikasikan kelompok kepemilikan tanah dengan nilai terendah pada blok peta tersebut.
- d. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) merupakan list/daftar yang dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB untuk mempermudah melakukan penilaian harga jual bangunan. DBKB terdiri dari 3 komponen.
- e. Program Komputer SISMIOP, sebagai pedoman administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mulai diaplikasikan (diberlakukan) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1992, merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB. SISMIOP diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan di masa mendatang yang membutuhkan kecepatan, keakuratan, kemudahan dan tingkat efisiensi yang tinggi.

1.5 Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan diperlukan adanya suatu metode. Metode diperlukan untuk memperlancar suatu penulisan penelitian, untuk mempermudah pencarian data.

1.5.1. Tipe Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif, yaitu metode kualitatif yang memberikan informasi lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat diterapkan pada berbagai masalah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat sekarang (Surakhmad, 1985:139).

1.5.2. Sumber Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi yang berupa percakapan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan informasi atau data yang akurat (Kartini Kartono, 1986:17). Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa narasumber yang berkaitan yaitu kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

2. Observasi

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data secara akurat dengan langsung ke tempat tujuan penelitian atau magang ditempat penelitian, yaitu di kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

3. Studi Pustaka

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mengambil data dari berbagai sumber data diantaranya diambil dari buku-buku literature, jurnal, surat kabar, peraturan atau undang-undang yang berlaku pada saat ini dan beberapa dari internet.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar isi tugas akhir ini tersusun sesuai dengan judul tema yang dibahas maka perlu sistematika yang memuat alur penulisan yang dibagi dalam setiap bab dan sub bab, adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang awal pembukaan yang menjelaskan secara umum mengapa dan bagaimana penulisan tugas akhir ini ditulis dan disusun. Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

Berisi tentang uraian atau keterangan mengenai gambaran Program Simpanan Keluarga Sejahtera serta visi dan misi, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan “Penerapan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) Sebagai Sarana Peningkatan Pelayanan dan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan di Kabupaten Kendal Tahun 2016”

BAB IV PENUTUP

Bab IV membahas penutup yang isinya meliputi kesimpulan dan saran yang menjadi landasan akhir suatu penelitian.